

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kota Baubau

2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kota Baubau

2017



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BAUBAU 2017

No. Publikasi : **7472.17.14**
Katalog BPS : **4102004.7472**
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv +101 halaman

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Kota Baubau

Gambar Kover :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Baubau

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Baubau

Dicetak Oleh :
UD. Syahid Kendari

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Baubau 2017 merupakan publikasi kedua Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Baubau. Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Instansi terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, serta Kemiskinan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Baubau, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Baubau



Sudirman K, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xi
Singkatan dan Akronim	xii
Bab 1 Kependudukan	1
Bab 2 Kesehatan dan Gizi	15
Bab 3 Pendidikan	29
Bab 4 Ketenagakerjaan	45
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi	55
Bab 6 Perumahan dan Lingkungan	61
Bab 7 Kemiskinan	69
Lampiran	77
Sumber Data	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
KEPENDUDUKAN	
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubau dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2017.....	5
1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2017.....	7
1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2017.....	10
1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Baubau, 2016 - 2017	12
1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2016 - 2017.....	14
KESEHATAN DAN GIZI	
2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Baubau, 2016-2017 .	19
2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Baubau, 2016 - 2017.....	20
2.3 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Mendapat ASI Eksklusif dan Lamanya Disusui di Kota Baubau, 2016 - 2017	21
2.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Baubau, 2016 - 2017.....	23

2.5	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan di Kota Baubau, 2016 - 2017.....	24
2.6	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Baubau, 2016 - 2017.....	25
2.7	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kota Baubau, 2017... ..	27

PENDIDIKAN

3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Kota Baubau, 2015-2017	36
3.2	Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016-2017.....	37
3.3	Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi dan Jenis Kelamin yang Dimiliki Tahun 2016-2017...	38
3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Penduduk berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2017 ...	40
3.5	Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2014/2015-2017/2018	42

KETENAGAKERJAAN

4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau Menurut Jenis Kelamin, 2015 dan 2017	49
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Baubau Menurut Tingkat Pendidikan, 2017	51
4.3	Persentase Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 dan 2017	52

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 - 2017.....	58
5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah) 2016 - 2017	60

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, Kota Baubau, 2016-2017	65
6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Luas lantai per-kapita,2016-2017	66
6.3 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016 - 2017	68
6.4 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal Perumahan, 2016 -2017	69

KEMISKINAN

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau, 2013-2017	74
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2016-2017	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Angka Beban Ketergantungan di Kota Baubau, 2014-2017	8
1.2 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 - 2017.....	11
1.3 Persentase Partisipasi KB Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 tahun 2017 di Kota Baubau	13
2.1 Angka Kesakitan Kota Baubau (%), 2016 - 2017	18
2.2 Persentase Penduduk Berusia 0-23 Bulan yang Masih Diberikan ASI, 2016-2017	21
2.3 Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi menurut Jenis Imunisasi lengkap, 2016-2017.....	23
3.1 Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Baubau, 2016-2017	33
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Baubau, 2014-2017	34
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Baubau, 2015 - 2017	48
4.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Umur 15+ Tahun Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (ribu jiwa), 2017.....	50
5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Baubau Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 - 2017.....	57
6.1 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2017	67
<i>Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Baubau 2017</i>	xi

<https://baubaukota.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
AHH	Angka Harapan Hidup
HLS	Harapan Lama Sekolah



KEPENDUDUKAN





Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menunjang dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena dari penduduk berkualitas memungkinkan untuk bisa mengolah potensi sumber daya alam yang ada dengan baik, tepat, dan efisien guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Indikator kualitas atau mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti; pendapatan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu menjadi penghambat bagi jalannya pembangunan jika penduduk mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya



terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia. Jumlah penduduk di Kota Baubau tahun 2017 tercatat 162.780 jiwa atau 6,00 persen dari total penduduk di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjumlah 2.602.389 jiwa. Jumlah penduduk Kota Baubau mengalami penambahan kurang lebih 4.509 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 158.271 jiwa. Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, jumlah penduduk di Kota Baubau saat ini mengalami peningkatan kurang lebih 10,66 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu lima tahun terakhir di Kota Baubau telah mengalami penambahan penduduk sebesar 17.353 jiwa.

Kegunaan laju pertumbuhan penduduk adalah untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.



Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 tercatat sebesar 2,50 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016. Tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Kota Baubau sebesar 2,41 persen.

Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Baubau dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	145 427	2,01	97,56
2014	151 485	2,24	97,50
2015	154 877	2,01	97,34
2016	158 271	2,41	97,66
2017	162 780	2,50	97,53

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada tahun 2017 penduduk Kota Baubau sebesar 6 persen dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kabupaten Konawe.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kota Baubau pada tahun 2017 sebesar 97,53. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 98 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Baubau lebih sedikit bila dibanding penduduk perempuan. Bila dilihat rasio jenis kelamin berdasarkan Kecamatan dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Kecamatan Lea-Lea yaitu sebesar 94 persen dan yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kelurahan Wolio yaitu 101 persen.



Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Kota Baubau. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Selama ini persebaran penduduk Baubau terkonsentrasi pada wilayah perkotaan. Kondisi tersebut tergambar pada tabel di bawah 1.2

Kecamatan Batupoaro merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau yaitu 18.335 jiwa/Km².



Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan, 2017

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
Betoambari	590	11,91
Murhum	3 739	14,07
Batupoaro	18 335	18,92
Wolio	1 328	27,65
Kokalukuna	1 183	12,22
Sorawolio	75	5,18
Bungi	144	5,19
Lea-lea	240	4,85
Baubau	552	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 -2035

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa di beberapa kecamatan yang sebagian besar wilayah kelurahannya berstatus pedesaan memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan yang berstatus perkotaan. Dimana Kecamatan yang memiliki sebagian besar kelurahannya berstatus pedesaan adalah Kecamatan Sorawolio, Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lea-lea, sedangkan kecamatan lainnya sebagian besar bahkan seluruh kelurahannya bersatus perkotaan. Kecamatan Batupoaro memiliki kepadatan penduduk paling tinggi di Kota Baubau sekitar 18.335 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Sorawolio memiliki kepadatan paling rendah sekitar 75 jiwa per km². Kepadatan penduduk di



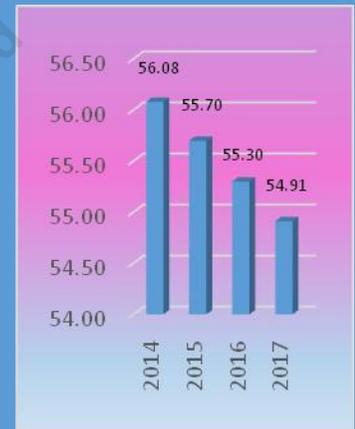
seluruh kecamatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan.

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2015-2017 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2014 angka beban tanggungan di Kota Baubau sebesar 56,08 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 penduduk usia belum dan tidak produktif. Sampai tahun 2016, angka beban tanggungan penduduk mengalami penurunan menjadi 55,30 persen, artinya setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 55 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Gambar 1.1 Angka Beban Ketergantungan di Kota Baubau 2014-2017





Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 proporsi penduduk usia 0-14 ada sebanyak 32,13 persen dan mengalami penurunan menjadi 31,90 persen pada tahun 2015 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 31,65 persen dan 31,40 persen.



Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2014-2017

Tahun	0-14 Tahun (%)	15-64 Tahun (%)	65 Tahun + (%)	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	32,13	64,07	3,80	56,08
2015	31,90	64,23	3,88	55,70
2016	31,65	64,39	3,96	55,30
2017	31,40	64,55	4,05	54,91

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada Tabel 1.3. juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Kota Baubau masih didominasi oleh penduduk usia produktif mencapai 64,07 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 64,23 persen dan terus meningkat di tahun 2016 dan 2017 menjadi 64,39 persen dan 64,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Baubau menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin meningkat dari 3,80 persen pada tahun 2014 menjadi 3,88 persen pada tahun 2015, 3,96 persen pada tahun 2016 dan 4,05 persen pada tahun 2017.



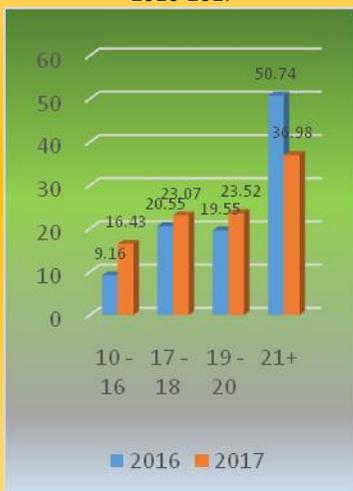
Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase wanita di Kota Baubau berusia 10-16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 16,43 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai usia ideal untuk melakukan perkawinan pertama masih rendah, karena pada usia 10-16 tahun, seseorang masih dapat dikatakan sebagai anak-anak yang belum siap untuk membina sebuah keluarga.

Gambar 1.2. Persentase Wanita Umur 10+ tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Baubau, 2016-2017





Tahun 2017 sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya mengalami penurunan dari 50,74 persen pada tahun 2016 turun menjadi 36,98 persen pada tahun 2017. Sementara itu, wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 19-20 tahun mengalami peningkatan di tahun 2017 dari 19,55 persen di tahun 2016 menjadi 23,52 persen.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Baubau, 2016 - 2017

Persentase tertinggi wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di Kota Baubau pada tahun 2017 berada pada kelompok umur 21 tahun keatas yaitu 36,98 persen.

Kelompok Umur (Tahun)	Tahun	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
10-16	9,16	16,43
17-18	20,55	23,07
19-20	19,55	23,52
21 +	50,74	36,98

[Diolah dari Hasil Susenas]

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB dengan berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang



menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016-2017, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB masih rendah, yaitu sebesar 35,81 persen (2016) dan 43,09 persen (2017).

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2016 penggunaan suntikan mencapai 56,28 persen dan menurun menjadi 36,06 persen pada tahun 2017. Sementara itu, penggunaan pil mengalami peningkatan dari 33,16 persen pada tahun 2016 menjadi 44,30 persen pada tahun 2017.

Gambar 1.3 Persentase Partisipasi KB Penduduk Wanita Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun di Kota Baubau 2017





Tahun 2017 jenis alat/cara KB yang paling sedikit penggunaannya adalah kondom dan pantang berkala/kalender masing-masing sebesar 1,53 persen dan 1,58 persen. Beberapa alat/cara KB yang mengalami sedikit peningkatan pengguna selama tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 adalah pengguna IUD/ spiral, susuk, kondom/karet dan menyusui/lainnya masing – masing sebesar 2,48 persen, 8,86 persen, 1,53 dan 3,55 persen.

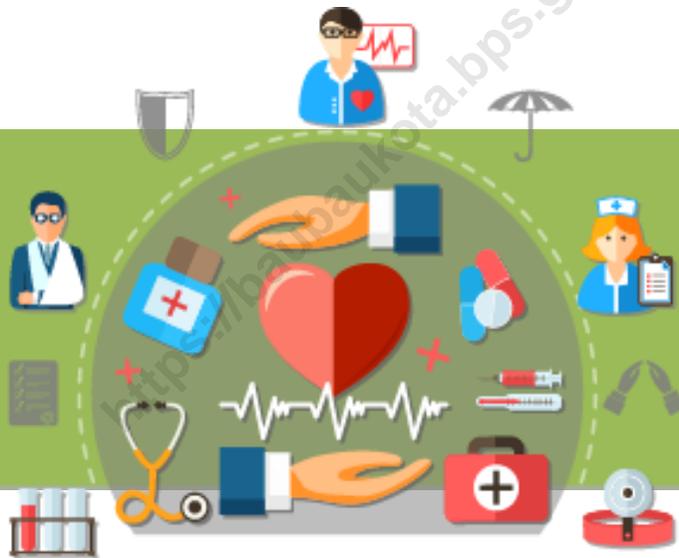
Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Alat/Cara KB	Peran	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	3,02	1,63
MOP/Vasektomi	0,00	0,00
AKDR/IUD/Spiral	0,00	2,49
Suntikan	56,28	36,06
Susuk KB/Norplant/Implanon/alwalit	3,05	8,86
Pil	33,16	44,30
Kondom/karet	0,38	1,53
Intravag/tissue/kondom wanita	0,00	0,00
Pantang berkala/Kalender	3,38	1,58
Menyusui dan Lainnya	0,73	3,55
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	35,81	43,09



KESEHATAN DAN GIZI





KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan



Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kesakitan, Prevalensi Balita Kurang Gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

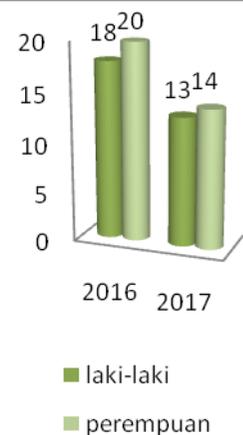
Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata – rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) dapat mencerminkan derajat kesehatan penduduk di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Angka Harapan Hidup (e_0) masyarakat di Kota Baubau tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yaitu dari 70,47 tahun menjadi 70,50 tahun. Hal ini dapat menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Baubau.

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: semakin baik dan terakses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas, semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat serta dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1 Angka Kesakitan (%) di Kota Baubau, 2016-2017





KESEHATAN DAN GIZI

Tabel 2.1 Perkembangan Angka Harapan Hidup (e_0) di Kota Baubau, 2016 - 2017

Tahun	Angka Harapan Hidup (e_0)
(1)	(2)
2016	70,47
2017	70,50

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Tahun 2017 tercatat terdapat 3 rumah sakit, 1 rumah sakit bersalin, 17 puskesmas, 156 posyandu, 5 klinik/balai kesehatan dan 17 polindes. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah fasilitas kesehatan sebesar 5,29 persen dikarenakan terjadi penambahan jumlah posyandu dan polindes.

Tingkat kesehatan di suatu wilayah dapat dilihat dari angka kesakitan (morbiditas). Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Baubau mencapai 13,74 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 19,01 persen. Selain angka kesakitan lamanya sakit juga merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah.

Hasil olah Susenas 2017 menunjukkan bahwa persentase bayi laki-laki usia 0-23 bulan yang diberikan ASI lebih banyak dari pada bayi perempuan yaitu 86,85 persen sedangkan bayi perempuan sebesar 84,80 persen



Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2017 dapat dikatakan terjadi peningkatan kondisi kesehatan penduduk. Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan hasil rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Baubau, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit (Hari)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki- laki	18	12,89	5	5
Perempuan	20	14,57	4	5
Total	19,01	13,74	5	5

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat



KESEHATAN DAN GIZI

gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya.

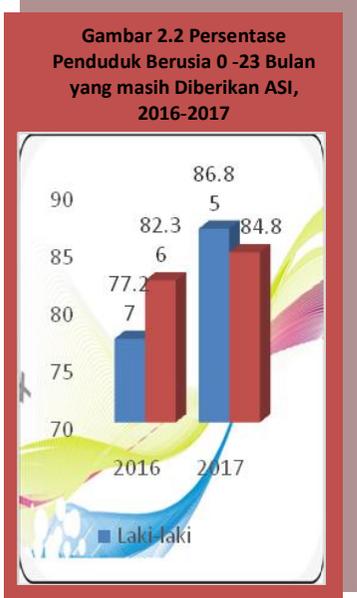
Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/ minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Tabel 2.3 Persentase Anak Usia 0-23 bulan yang Mendapat ASI Eksklusif dan Lamanya Disusui di Kota Baubau, 2016 -2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Kelamin	Persentase Anak Usia 0 -23 Bulan yang Mendapat Asi (%)				Rata-rata Lama Disusui (bulan)
	0 -11	12 -15	16 -19	20 -23	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki – laki					
2016	68,46	11,51	12,03	8,00	9
2017	39,78	52,97	4,58	2,68	11
Perempuan					
2016	52,23	24,62	13,90	9,24	11
2017	59,57	14,32	8,20	17,92	11

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 pemberian ASI paling banyak pada baduta laki-laki sampai usia 12-15 bulan yaitu sebesar 52,97 persen, sedangkan pada baduta perempuan sampai usia 11 bulan sebesar 59,57 persen.





Pada usia 12 bulan ke atas pemberian ASI sudah mulai berkurang. Rata-rata pemberian ASI pada balita laki-laki maupun perempuan pada tahun 2017 selama 11 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2017, balita yang mendapatkan imunisasi wajib mencapai 18,47 persen. Bila dilihat persentase jumlah balita yang mendapatkan imunisasi pada tahun 2017 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2016. Balita yang mendapat imunisasi BCG mengalami peningkatan dari 90,20 persen di tahun 2016 menjadi 92,76 persen di tahun 2017. Balita yang mendapat imunisasi DPT juga mengalami peningkatan dari 85,49 persen di tahun 2016 menjadi 89,85 persen di tahun 2017. Begitu pula jumlah balita yang mendapat imunisasi Polio, dan Hepatitis B di tahun 2017 jumlahnya mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 masing – masing dari 89,67 persen menjadi 91,20 persen dan dari 86,86 persen menjadi 91,20 persen. Sedangkan jumlah



balita yang mendapat imunisasi campak mengalami penurunan di tahun 2017, dari 74,44 persen menjadi 54,47 persen.

Tabel 2.4 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Baubau, 2016 -2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Imunisasi	Perkotaan	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
BCG	90,20	92,76
DPT	85,49	89,85
Polio	89,67	91,02
Campak	74,44	54,47
Hepatitis B	86,86	91,20

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa.



Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat dari 91,27 persen pada tahun 2016 menjadi 98,83 persen di tahun 2017. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya peran tenaga kesehatan khususnya bidan sebagai penolong persalinan. Penolong persalinan yang dilakukan oleh bidan selama tahun 2016-2017 mengalami peningkatan masing-masing dari 77,78 persen menjadi 87,44 persen. Penolong persalinan oleh dokter kandungan dan dukun tradisional mengalami penurunan pada tahun 2017, masing-masing dari 12,79 menjadi 11,37 persen dan dari 8,73 persen menjadi 1,17 persen.

2.5 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam 2 Tahun Terakhir Menurut Penolong Persalinan di Kota Baubau, 2016- 2017

Penolong Persalinan	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Tenaga Kesehatan	91,27	98,83
- Dokter Kandungan	12,79	11,37
- Dokter Umum	0,70	0,02
- Bidan/Perawat	77,78	87,44
Bukan Tenaga Kesehatan	8,73	1,17
- Dukun Bayi	8,73	1,17
- Lainnya	0,00	0,00



KESEHATAN DAN GIZI

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/ tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Di Kota Baubau, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang dominan menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Baubau, pada tahun 2017 terdapat 53 bidan dan 176 perawat yang tersebar pada 17 puskesmas.

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kota Baubau, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tempat Berobat	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan (%)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit	4,85	12,53
Praktek Dokter/Bidan	21,15	24,27
Klinik/Praktek Dokter Bersama	6,37	4,77
Puskesmas/ Pustu	67,24	55,02
UKBM*	0,74	4,52
Pengobatan Tradisional	1,07	2,48
Lainnya	1,16	1,02
% penduduk yang berobat jalan	47,10	47,46

*) UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu & Balai Pengobatan



Pada Tabel 2.7 tergambar bahwa telah terjadi peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tentang kesehatan. Hal ini ditandai dengan banyaknya penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Persentase penduduk yang berobat jalan ke fasilitas kesehatan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016, dari 47,10 persen menjadi 47,46 persen di tahun 2017. Hal ini seiring dengan meningkatnya kepemilikan jaminan kesehatan seperti BPJS yang menentukan rujukan tempat berobat.

Tahun 2016 -2017 Puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi. Sementara itu, penduduk yang berobat ke klinik/praktek dokter bersama serta lainnya mengalami penurunan. Persentase penduduk yang berobat ke klinik/praktek dokter mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 dari 6,37 persen menjadi 4,77 persen pada tahun 2017. Sedangkan persentase penduduk yang berobat ke lainnya berkurang dari 1,16 persen menjadi 1,02 persen pada tahun 2017.

Ketersediaan tenaga kesehatan medis yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terus diusahakan oleh pemerintah. Tercermin dari sasaran dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 dalam hal meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran minimal 1 puskesmas tiap kecamatan yang terakreditasi dan minimal 1 RSUD yang terakreditasi di setiap kab/kota.



KESEHATAN DAN GIZI

Di Kota Baubau terdapat 2 puskesmas pada setiap kecamatan, kecuali Kecamatan Wolio dan Kecamatan Betoambari yang memiliki 3 puskesmas. Sedangkan jumlah rumah sakit pemerintah/swasta sebanyak 4 unit yang tersebar di Ke. Murhum dan Kec. Wolio yang merupakan wilayah perkotaan.

Tabel 2.7 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kota Baubau, 2017

Puskesmas	Tenaga Kesehatan/Health Personnel			
	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas				
1. Katobengke	4	13	5	-
2. Sulaa	3	7	5	-
3. Waborobo	2	5	7	-
4. Wajo	5	22	2	1
5. Melai	2	8	4	1
6. Bone-Bone	2	12	3	1
7. Wameo	3	12	2	-
8. Wolio	5	10	5	-
9. Bataraguru	4	11	6	-
10. BWI	2	13	5	-
11. Liwuto	2	7	4	1
12. Kadolomoko	2	11	5	-
13. Kampeonaho	1	4	4	-
14. Bungi	2	7	2	1
15. Sorawolio	3	9	3	1
16. Lakolagou	2	6	5	1
17. Lowu – lowu	2	7	6	1
Jumlah	46	164	73	8

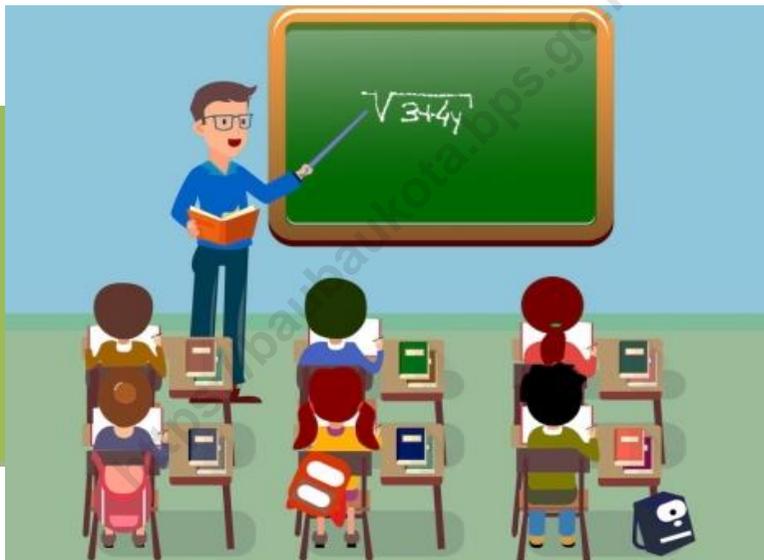


Dari data jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Baubau, diharapkan tujuan dari kementerian kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat seperti menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya persentase BBLR, meningkatkan upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dan pembiayaan kegiatan promotif dan preventif serta meningkatnya upaya perilaku hidup bersih dan sehat dapat terwujud.

<https://baubaukota.bps.go.id>



Pendidikan





PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa

PENDIDIKAN



Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini.

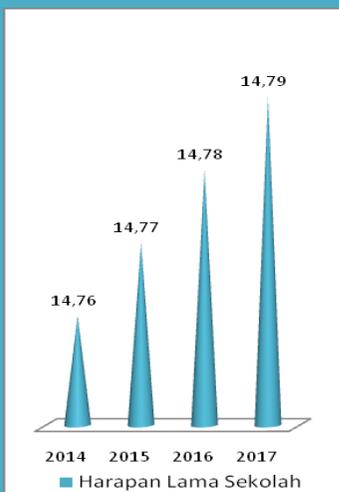


Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, dan Rasio Murid Guru serta Rasio Murid Kelas.

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Gambar 3.1 Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk di Kota Baubau, 2016-2017



Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi Tenggara, tujuan pembangunan pendidikan diantaranya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Hal ini



dikarenakan masih terbatasnya akses anak usia sekolah terhadap layanan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan berbagai kebijakan tersebut diharapkan angka putus sekolah menurun. Dengan turunnya angka putus sekolah, secara tidak langsung berdampak pada semakin tingginya harapan lama sekolah bagi penduduk usia tujuh tahun keatas.

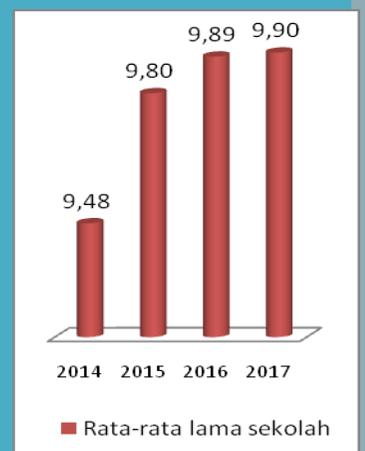
Secara tidak langsung, ada hubungan keterkaitan antara harapan lama sekolah, angka putus sekolah dan kondisi pendidikan saat ini.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Baubau pada tahun 2014 sampai 2017 relatif sama, dari 14,77 tahun sampai 14,79 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D2. Kenaikan HLS dapat menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di suatu wilayah.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Baubau, 2014-2017





PENDIDIKAN

dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kota Baubau pada tahun 2017 tercatat 9,90 tahun. Ini berarti selama tahun 2017, rata-rata penduduk Kota Baubau usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas 1). Angka tersebut tidak berbeda jauh dengan tahun 2016, yang mencapai 9,89 tahun. Meskipun terjadi kenaikan RLS pada tahun 2017 tetapi dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berbeda bila dibandingkan tahun 2016.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya dengan anggapan bahwa pada usia 25 penduduk diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.



**Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Penduduk Kota Baubau, 2014-2016**

Indikator	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,76	14,77	14,78	14,79
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	9,48	9,80	9,89	9,90

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/ keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang

pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.



Tabel 3.2 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2016 - 2017

Tingkat Pendidikan	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah SD	12,44	12,22
SD/MI/Paket A	25,30	19,13
SMP/MTS/Paket B	10,40	18,29
SMA/SMK/MA/Paket C	32,84	35,16
Diploma I s.d III	3,74	3,75
Diploma IV/S1	14,40	10,35
S2/ S3	0,88	1,10

Berdasarkan hasil Susenas pada tahun 2017 penduduk Kota Baubau usia 15 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 50,36 persen dan mayoritas penduduk Kota Baubau menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Hal ini berarti program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah di Kota Baubau berhasil. Bila diamati pada setiap jenjang pendidikan pada tahun 2017 terjadi penurunan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah dari 12,44 persen di tahun 2016 menjadi 12,22 persen. Persentase penduduk yang menamatkan pendidikan SD/MI/Paket A dan Diploma IV/S1 pada tahun 2017 mengalami penurunan bila di bandingkan tahun 2016 masing-masing dari 25,20 persen dan 14,40 persen, menjadi 19,13 persen, serta 10,35 persen.



Bila dibandingkan dengan data tahun 2016 terjadi peningkatan penduduk yang menamatkan SMP/MTS/Paket B, dari 10,40 persen menjadi 18,29 persen di tahun 2017. Penduduk yang menamatkan SMA/SMK/MA/Paket C dari 32,84 persen menjadi 35,16 persen, penduduk yang menamatkan Diploma I s.d III dari 3,74 persen menjadi 3,75 persen serta penduduk yang menamatkan S2/S3 dari 0,88 persen menjadi 1,10 persen di tahun 2017. Hal ini berarti kesadaran penduduk tentang pentingnya pendidikan sudah mengalami peningkatan.

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimilik dan Jenis Kelamin, 2017

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki - laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah SD	11,34	13,06	12,22
SD/MI	20,01	18,30	19,13
SMP/MTS	16,56	19,93	18,29
SMA/SMK/MA	37,48	32,97	35,16
Diploma I s.d III	2,33	5,08	3,75
Diploma IV/S1	11,08	9,65	10,35
S2/ S3	1,20	1,01	1,10
Total	100	100	100

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur.



Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Murni (PM) merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 3.4 menyajikan data Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni penduduk di Kota Baubau. Pada tahun 2017 sekitar 0,20 persen penduduk usia 7-12 tahun dan 3,32 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 16-18 tahun penduduk yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 20,99 persen. Tabel 3.4 juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki usia 13-15 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan APS perempuan, sedangkan APS penduduk laki-laki usia 16-18 tahun lebih tinggi dari perempuan. Hal ini berarti penduduk laki-laki usia 16-18 tahun lebih banyak yang bersekolah daripada penduduk perempuan.



Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Kota Baubau Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
APS			
7-12 tahun	100,00	100,00	100,00
13-15 tahun	94,63	96,84	95,72
16-18 tahun	75,98	90,98	83,16
APM			
- SD/MI	96,47	100,00	98,22
- SMP/MTs	87,97	83,19	85,61
- SMA/SMK/MA	68,06	79,26	73,42

Pada tahun 2017 semua penduduk usia 7-12 tahun sudah mengenyam pendidikan atau bersekolah. Sedangkan pada penduduk usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun masih terdapat 4,28 persen dan 16,84 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun lebih rendah bila dibandingkan dengan APS perempuan. Hal ini berarti penduduk perempuan usia 13-18 tahun lebih banyak yang bersekolah daripada penduduk laki-laki.



PENDIDIKAN

Pada tingkat pendidikan SD/MI, dan SMA/SMK/MA APM perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan APM laki-laki.

Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan tepat waktu. Secara umum APM SD sebesar 98,22 persen menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 99,80 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 85,56 persen pada tahun 2016 menjadi 85,61 persen pada tahun 2017. APM tingkat SMA juga meningkat dari 71,47 persen di tahun 2017 menjadi 73,42 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA ke atas untuk perempuan pada tahun 2017 dan 2016 lebih tinggi dibanding tahun 2015.

Kualitas Pelayanan Pendidikan

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu layanan pendidikan merupakan program utama pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan bangsa. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan pendidikan antara lain rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.



Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas belajar/mengajar, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Tabel 3.5 Perkembangan Rasio Murid-Guru, 2013/2014-2017/2018
Kota Baubau

Tahun	Rasio Murid-Guru		
	SD&MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
2013/2014	9	8	10
2014/2015	18	6	6
2015/2016	13	10	11
2016/2017	35	10	9
2017/2018	12	12	11

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau



PENDIDIKAN

Selama tahun ajaran 2013/2014 hingga 2017/2018 Rasio Murid-Guru sangat berfluktuasi. Pada tahun 2015/2016 Rasio Murid-Guru SD tercatat sebesar 13 kemudian menurun menjadi 12 pada tahun ajaran 2017/2018. Hal ini berarti seorang guru SD bertanggung jawab untuk mengajar 12 siswa. Rasio Murid-Guru untuk jenjang pendidikan SMP selama tahun ajaran 2015/2016 – 2017/2018 tidak mengalami perubahan yang besar. Sedangkan rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun ajaran 2017/2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun ajaran 2016/2017 dari 9 menjadi 11.

<https://baubaukota.bps.go.id>



Ketenagakerjaan



<https://baubaukota.bps.go.id>



Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2016 dan 2017. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk



yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

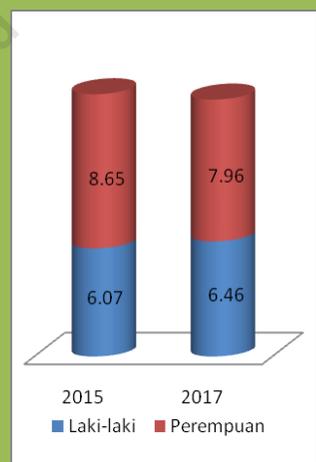
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

Berdasarkan hasil Sakernas bulan Agustus tahun 2018, TPAK Kota Baubau sebesar 62,85 persen, hal ini berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 63 orang yang aktif secara ekonomi (tersedia untuk memproduksi barang dan jasa). Jika dibandingkan dengan tahun 2015, TPAK Kota Baubau pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,55 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK Laki-laki dan TPAK perempuan mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2015. TPAK laki-laki dari 78,92 persen pada tahun 2015 turun menjadi 77,06 persen pada tahun 2017, sedangkan TPAK perempuan dari 54,66 persen pada tahun 2015 menjadi 49,49 persen pada tahun 2017. Penurunan TPAK ini merupakan indikasi menurunnya kecenderungan penduduk untuk aktif mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Gambar 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau 2015-2017





TPAK penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 lebih tinggi dari pada TPAK perempuan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih aktif secara ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan penduduk perempuan, mengingat tanggung jawab penduduk laki-laki adalah sebagai kepala keluarga.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Kota Baubau Menurut Jenis Kelamin, 2014 - 2015

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	2015	2017	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki - laki	78,92	77,06	6,07	6,46
Perempuan	54,66	49,49	8,65	7,96
Total	66,40	62,85	7,17	7,07

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2017 lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT pada tahun 2015, dari 7,17 persen menjadi 7,07 persen atau menurun 0,10 persen. TPT tahun 2017 sebesar 7,07 mempunyai arti bahwa dari 100 penduduk Kota Baubau berusia 15 tahun ke atas yang bersedia untuk memproduksi barang dan jasa sebanyak 7 orang, dimana 7 orang itu adalah pengangguran. Bila dilihat dari jenis kelamin, TPT

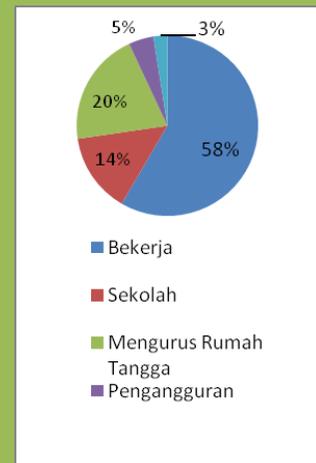


penduduk laki-laki tahun 2017 sebesar 6 persen dan TPT penduduk perempuan sebesar 7 persen atau dengan kata lain TPT laki-laki lebih rendah dari pada perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih aktif secara ekonomi daripada perempuan. Tingkat Pengangguran tahun 2017 menggambarkan kondisi yang sama hanya saja nilai TPT laki-laki mengalami peningkatan dari 6,07 persen pada tahun 2015 menjadi 6,46 persen di tahun 2017, sedangkan TPT penduduk perempuan mengalami penurunan dari 8,65 persen menjadi 7,96 persen. Penurunan angka TPT perempuan tersebut berarti terjadi kenaikan penduduk perempuan yang bekerja.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Gambar 4.2 Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (ribu jiwa), 2017





Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Baubau Menurut Tingkat Pendidikan, 2017

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah dan Tamat SD	12,39
SMP	2,69
SMA	31,76
SMK	17,35
Diploma I/II/III dan Akademi	1,46
Universitas	34,35
Total	100

Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa- jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).



Secara umum persentase penduduk yang bekerja pada kategori lapangan usaha industri pada Agustus 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,02 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 yaitu dari 15,29 persen menjadi 18,31 persen, sedangkan pada kelompok usaha yang lain (Pertanian dan Jasa – jasa) persentase penduduk yang bekerja pada berusia 15 tahun ke atas mengalami penurunan.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Kota Baubau Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 dan 2017

[Diolah dari Hasil Sakernas, Agustus]

Kelompok Usaha	Peran	
	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Pertanian (A)	12,46	9,57
Industri (M)	18,31	7,00
Jasa-Jasa (S)	69,23	83,41

Catatan :Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

Cakupan lapangan usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.

Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.



Penurunan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPK) di Kota Baubau khususnya di sektor pertanian dan industri. Peran penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 12,46 persen menjadi 9,57 persen. Begitupula pada sektor industri terjadi penurunan dari 18,31 persen menjadi 7,00 persen. Dari Tabel 4.3 tergambar bahwa mayoritas penduduk di Kota Baubau bekerja di sektor jasa-jasa.

<https://baubaukota.bps.go.id>

<https://baubaukota.bps.go.id>



Taraf Dan Pola Konsumsi



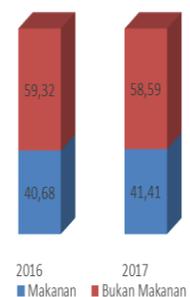


Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsinya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Baubau Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2017



penduduk dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Kota Baubau, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	368 999	416 677	40,68	41,41
Bukan Makanan	538 141	589 636	59,32	58,59
Perumahan	316 129	316 264	58,74	53,64
Barang dan Jasa	106 916	124 594	19,87	21,13
Pakaian	36 479	31 647	6,78	5,37
Barang Tahan Lama	41 750	64 973	7,76	11,02
Lainnya	36 867	52 158	6,85	8,85
Jumlah	907 140	1 006 313	100,00	100,00

Selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 901.140,- menjadi Rp 1.006.313,-. Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 40,68 persen pada tahun 2016 menjadi 41,41 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari 59,32 persen menjadi 58,59 persen. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kesejahteraan. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada konsumsi barang dan jasa, barang tahan lama dan pengeluaran lainnya.



Sedangkan, pengeluaran yang mengalami penurunan terjadi pada perumahan dan pakaian. Pengeluaran lainnya disini meliputi pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, pajak pemakaian dan premi asuransi serta keperluan pesta. Penurunan pengeluaran yang terjadi pada pengeluaran perumahan dan lainnya masing-masing dari 58,74 persen dan 6,78 persen di tahun 2016 menjadi 53,64 persen dan 5,37 persen pada tahun 2017.

Secara umum, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 persentase pengeluaran untuk makanan sebesar 40,68 persen sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 41,41 persen. Dengan nominal, dari Rp 368.999,- menjadi Rp. 416.677,- per kapita sebulan.

Pada tahun 2017 Tabel 5.2 menyajikan data rata – rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makan dan non makanan menurut golongan pengeluaran. Pada tahun 2017 diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk antara 100 ribu sampai 499 ribu lebih banyak digunakan untuk konsumsi makanan daripada untuk non makanan, sedangkan untuk golongan pengeluaran antara 750 ribu rupiah sampai diatas 1 juta rupiah rata-rata sebagian besar digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

Secara umum pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar 368 ribu rupiah digunakan untuk konsumsi makanan dan sebesar 538 ribu rupiah untuk konsumsi bukan makanan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 12,92 persen pada pengeluaran untuk makanan atau dari 368 ribu rupiah pada tahun 2016 menjadi 416 ribu rupiah pada

tahun 2017. Sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan terjadi kenaikan sebesar 9,4 persen atau dari 538 ribu rupiah menjadi 589 ribu rupiah.

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah), 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Golongan Pengeluaran per Kapita	Makanan		Bukan Makanan	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 100 000	0	0	0	0
100 000 - 149 999	58,29	103,01	60,95	33,41
150 000 - 199 999	93,69	117,81	70,16	71,49
200 000 - 299 999	134,38	142,98	122,91	113,22
300 000 - 499 999	199,97	210,93	193,60	189,42
500 000 - 749 999	274,49	330,85	326,74	294,57
750 000 - 999 999	399,63	421,30	398,93	474,99
> 1 000 000	642,66	723,29	1 091,79	1 208,34
Total	368,99	416,68	538,14	589,64



Perumahan Dan Lingkungan





Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik peran maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas



lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, serta memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2017, sudah hampir seluruh rumah tangga di Kota Baubau bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Pada tahun 2017, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 98,61 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 99,59 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Dari hasil Susenas 2016 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes mencapai 97,86 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 97,95 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu dari 96,37 persen di tahun 2016 menjadi 93,40 persen pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 sudah hampir seluruh rumah tangga di Sulawesi Tenggara bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah. Dimana sebanyak 46,03 persen berlantai semen/bata merah. Sementara itu, persentase rumah tangga yang berlantai tanah hanya sebesar 3,36 persen.



Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Baubau, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Indikator Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Lantai bukan tanah (%)	99,59	98,61
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	97,86	97,95
Dinding terluastembok dan kayu (%)	96,37	93,40

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Pada tahun 2016 dan 2017 sebagian besar rumah tangga bertempat tinggal pada bangunan yang memiliki luas lantai



antara 50 s.d 99 m². Pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase jumlah rumah tangga yang mendiami luas lantai bangunan tempat tinggal ukuran 20 s.d 49 m² dari 31,90 persen menjadi 28,31 persen, luas lantai 100 s.d 149 m² dari 12,74 persen menjadi 10,46 persen. Sementara itu, untuk luas lantai ukuran 50 s.d 99 m² mengalami peningkatan dari 38,20 persen di tahun 2016 menjadi 43,26 persen di tahun 2017, peningkatan persentase jumlah rumah tangga juga terjadi pada rumah tangga yang mendiami bangunan dengan luas ≤ 19 m² yaitu dari 8,79 persen menjadi 9,10 persen, luas lantai bangunan tempat tinggal ≥ 150 m² juga mengalami peningkatan dari 8,37 persen menjadi 8,86 persen.

Mayoritas rumah tangga di Kota Baubau pada tahun 2016 dan 2017 tinggal pada bangunan tempat tinggal yang memiliki luas 50-99 m².

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Luas Lantai Perkapita, 2016- 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal (m ²)	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
≤ 19 m ²	8,79	9,10
20-49 m ²	31,9	28,31
50-99 m ²	38,2	43,26
100-149 m ²	12,74	10,46
≥ 150 m ²	8,37	8,86



Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2017



Pada tahun 2017, rumah tangga di Kota Baubau yang telah mengakses air bersih, yaitu air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 . Persentase tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan data tahun 2017 yang mencapai 99,00 persen.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan jamban



dengan tangki septik sudah mencapai 92,73 persen atau mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 (92,18 persen).

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2016, 99,40 persen rumah tangga di Kota Baubau telah menikmati fasilitas penerangan listrik. Angka tersebut meningkat pada tahun 2017 yang mencapai 99,91 persen.

Tabel. 6.3 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Fasilitas Perumahan	Persentase Rumah Tangga (%)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Air minum bersih ¹⁾	78,11	77,73
Jamban sendiri	69,97	75,75
Jamban dengan tangki septik, SPAL	92,18	92,73
Sumber penerangan Listrik	99,40	99,91

Catatan :¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) ≥ 10 m



Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga di Kota Baubau Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016 - 2017

[Diolah dari Hasil Susenas]

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Peran	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	69,26	65,01
Kontrak/Sewa	10,02	12,51
Bebas Sewa/Rumah Dinas/Lainnya	20,72	22,47



PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan hasil Susenas 2017, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 65,01 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 69,26 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebesar 34,98 persen yang terdiri dari 12,51 persen kontrak/sewa, 22,47 persen bebas sewa/rumah dinas/lainnya.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kota Baubau memiliki rumah sendiri dan peningkatan persentase kotraan/sewa dan bebas sewa/rumah dinas/lainnya karena adanya migrasi penduduk dari tempat lainnya, mengingat posisi Kota Baubau yang sangat strategis karena dikelilingi oleh beberapa kabupaten, fasilitas umum yang memadai, serta sarana dan prasarana transportasi yang lengkap.



Kemiskinan





Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk Baubau. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs yang pertama yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.



KEMISKINAN

Perkembangan Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kota Baubau mengalami penurunan selama periode 2013-2017. Tahun 2013, jumlah penduduk miskin sebesar 15,10 ribu jiwa atau 10,11 persen dari jumlah seluruh penduduk di Kota Baubau pada tahun tersebut. Pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin terus berkurang menjadi 14,10 ribu jiwa atau 9,25 persen dari jumlah penduduk tahun 2014. Tahun 2015 tercatat jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14,29 ribu jiwa atau 9,24 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2015. Penduduk miskin kembali turun pada tahun 2016, menjadi 13,87 ribu jiwa atau 8,79 dari total penduduk pada tahun 2016.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Baubau, 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2013	15,10	10,11
2014	14,10	9,25
2015	14,29	9,24
2016	13,87	8,76
2017	13,55	8,39

Catatan : Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret



Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Baubau mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2013-2017 dari Rp. 257.174,- menjadi Rp. 297.991,- perkapita/bulan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P_1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai P_1 yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat.

P_1 pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2016 dari 1,21 menjadi 1,13 hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Baubau, 2016 -2017

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan(Rp/Kapita/Bulan)	291 873	297 991
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	1,21	1,13
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)	0,32	0,34

Sumber : BPS

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 tahun 2017 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 dari 0,32 menjadi 0,34. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin membesar. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Baubau pada tahun 2017 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, tetapi ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin membesar, hal ini mengindikasikan bahwa adanya ketimpangan pendapatan yang diterima kelompok penduduk miskin. Namun, disaat yang sama besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan mengalami penurunan.



LAMPIRAN

I

(1) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
					2015	2016
	2014	2015	2016	2017	-	-
					2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Betoambari	18 023	18 433	18 844	19 381	2,18	2,76
Murhum	21 311	21 793	22 275	22 918	2,18	2,86
Batupoaro	28 648	29 291	29 941	30 802	2,18	2,86
Wolio	41 948	42 862	43 782	45 008	2,07	2,76
Kokalukuna	18 512	18 929	19 342	19 891	2,18	2,76
Sorawolio	7 853	8 025	8 195	8 426	2,07	2,76
Bungi	7 848	8 030	8 210	8 452	2,18	2,86
Lea-lea	7 342	7 514	7 682	7 902	2,18	2,76
Baubau	151 485	154 877	158 271	162 780	2,07	2,76

LAMPIRAN



I

(2) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2017			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Betoambari	9 568	9 813	19 381	0,98
Murhum	11 174	11 744	22 918	0,95
Batupoaro	14 968	15 834	30 802	0,95
Wolio	22 605	22 403	45 008	1,01
Kokalukuna	9 850	10 041	19 892	0,98
Sorawolio	4 195	4 231	8 426	0,99
Bungi	4 184	4 268	8 452	0,98
Lea-lea	3 827	4 075	7 902	0,94
Baubau	80 371	82 409	162 780	0,98



LAMPIRAN

I

(3) Indikator Kependudukan

[Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035]

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Betoambari	587	600	590	11,89	11,90	11,91
Murhum	3 578	3 658	3 739	14,06	14,07	14,07
Batupoaro	17 435	17 822	18 335	18,91	18,91	18,92
Wolio	1 277	1 304	1 328	27,69	27,67	27,67
Kokalukuna	1 123	1 148	1 183	12,22	12,22	12,22
Sorawolio	72	74	75	5,18	5,18	5,18
Bungi	136	139	144	5,18	5,18	5,19
Lea-lea	225	230	240	4,85	4,85	4,85
Baubau	528	540	552	100	100	100,

LAMPIRAN



I

(4) Indikator Kependudukan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama (%), 2017				Jumlah
	< 16	17-18	19-20	21 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	14,85	20,22	25,78	39,15	100,00
Muna	11,44	17,61	24,84	46,11	100,00
Konawe	20,23	23,86	23,36	32,56	100,00
Kolaka	20,01	19,02	23,73	37,24	100,00
Konawe Selatan	20,84	31,36	22,74	25,07	100,00
Bombana	23,85	25,73	21,56	28,86	100,00
Wakatobi	10,41	22,69	25,88	41,01	100,00
Kolaka Utara	26,45	23,27	21,94	28,34	100,00
Buton Utara	16,55	22,03	23,19	38,23	100,00
Konawe Utara	16,30	25,66	23,70	34,34	100,00
Kolaka Timur	18,56	24,35	20,57	36,53	100,00
Konawe Kepulauan	15,45	23,41	30,47	30,67	100,00
Muna Barat	12,11	23,65	35,41	28,84	100,00
Buton Tengah	9,67	38,95	18,00	33,38	100,00
Buton Selatan	13,57	28,10	20,02	38,31	100,00
Kendari	8,62	13,18	23,27	54,92	100,00
Baubau	12,59	25,84	24,35	37,23	100,00
Sulawesi Tenggara	16,43	23,07	23,52	36,98	100,00



LAMPIRAN

II

(1) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	67,23	67,30
Muna	69,77	69,77
Konawe	69,48	69,52
Kolaka	69,97	70,05
Konawe Selatan	69,93	69,98
Bombana	67,72	67,82
Wakatobi	69,54	69,59
Kolaka Utara	69,62	69,74
Buton Utara	70,37	70,38
Konawe Utara	68,64	68,69
Kolaka Timur	71,58	71,66
Konawe Kepulauan	67,87	67,88
Muna Barat	69,78	69,79
Buton Tengah	67,17	67,17
Buton Selatan	67,17	67,17
Kendari	72,98	73,02
Baubau	70,47	70,50
Sulawesi Tenggara	70,46	70,47

LAMPIRAN



II

(2) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Anak Umur 0-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenisnya (%), 2017				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Buton	86,76	80,92	85,61	46,81	83,46
Muna	85,49	82,47	85,27	37,22	82,10
Konawe	95,28	90,58	92,28	72,14	89,62
Kolaka	85,75	80,41	82,16	48,80	76,98
Konawe Selatan	87,43	85,89	86,39	59,69	84,64
Bombana	82,68	83,46	85,33	57,01	83,45
Wakatobi	89,42	81,67	87,69	65,33	84,27
Kolaka Utara	80,41	77,88	79,17	56,29	72,65
Buton Utara	87,12	84,78	86,47	67,31	79,44
Konawe Utara	92,46	87,98	94,56	66,23	84,47
Kolaka Timur	92,89	89,83	92,89	69,87	92,16
Konawe Kepulauan	90,48	88,65	91,95	60,19	88,50
Muna Barat	91,26	89,40	95,44	48,55	90,96
Buton Tengah	64,61	58,87	62,89	19,89	59,34
Buton Selatan	89,34	78,92	88,14	62,06	86,41
Kendari	93,24	91,76	93,17	56,10	92,50
Baubau	92,76	89,85	91,02	54,47	91,20
Sulawesi Tenggara	87,94	84,56	87,20	55,58	84,42



LAMPIRAN

II

(3) Indikator Kesehatan dan Gizi

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Perempuan Pernah Kawin yang Pernah Melahirkan Menurut Penolong Kelahiran Terakhir (%), 2017			
	Dokter	Bidan	Tenaga Medis Lainnya	Dukun Tradisional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Buton	3,88	68.59	27,53	-
Muna	1,59	90.66	7,75	-
Konawe	15,47	72.32	12,22	-
Kolaka	16,71	67.35	14,63	1.31
Konawe Selatan	11,92	78.53	9,55	-
Bombana	18,24	69.31	10,98	1.47
Wakatobi	5,12	73.43	21,44	-
Kolaka Utara	22,38	64.37	10,41	2.84
Buton Utara	11,81	79.67	7,24	1.28
Konawe Utara	8,72	70.92	18,15	2.22
Kolaka Timur	17,90	79.98	2,12	-
Konawe Kepulauan	8,10	84.76	7,14	-
Muna Barat	4,98	89.85	5,16	-
Buton Tengah	1,48	70.75	27,77	-
Buton Selatan	14,86	78.72	6,42	-
Kendari	37,05	54.54	8,41	-
Baubau	11,39	79.68	7,76	1.17
Sulawesi Tenggara	14,80	73,57	11,10	0,52



III

(1) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	13,22	13,52
Muna	13,20	13,48
Konawe	12,96	12,97
Kolaka	12,37	12,38
Konawe Selatan	12,16	12,22
Bombana	11,80	11,81
Wakatobi	12,87	13,14
Kolaka Utara	11,92	11,93
Buton Utara	12,72	12,73
Konawe Utara	11,93	12,02
Kolaka Timur	11,33	11,58
Konawe Kepulauan	10,94	11,30
Muna Barat	11,64	12,06
Buton Tengah	12,31	12,32
Buton Selatan	12,54	12,55
Kendari	16,05	16,06
Baubau	14,78	14,77
Sulawesi Tenggara	13,24	13,36



LAMPIRAN



(2) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Buton	7,06	7,22
Muna	7,66	7,89
Konawe	8,60	8,77
Kolaka	8,19	8,31
Konawe Selatan	7,71	7,72
Bombana	7,52	7,53
Wakatobi	7,70	7,71
Kolaka Utara	7,49	7,50
Buton Utara	7,92	8,18
Konawe Utara	8,41	8,62
Kolaka Timur	6,65	6,90
Konawe Kepulauan	8,80	8,90
Muna Barat	6,24	6,48
Buton Tengah	7,01	7,02
Buton Selatan	6,81	7,06
Kendari	11,67	11,68
Baubau	9,89	9,90
Sulawesi Tenggara	8,32	8,46



III

(3) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	99,55	24.13	97,73	98,28	81,06	75,99
Muna	98,42	31.55	95,74	97,71	90,30	85,41
Konawe	99,34	47.58	90,34	91,14	70,77	68,66
Kolaka	98,92	43.15	95,54	94,49	63,80	62,22
Konawe Selatan	99,34	34.52	94,42	95,19	64,10	63,59
Bombana	98,94	34.05	85,69	86,68	64,18	63,36
Wakatobi	98,27	28.66	97,14	96,81	76,15	85,53
Kolaka Utara	100,00	26.09	85,09	87,07	55,60	60,31
Buton Utara	98,85	30.26	95,83	96,39	83,06	77,43
Konawe Utara	98,35	36.22	93,38	94,41	71,49	68,19
Kolaka Timur	100,00	49.60	94,62	95,51	69,59	66,69
Konawe Kepulauan	100,00	61.01	97,76	98,26	66,23	75,75
Muna Barat	-	36.98	-	88,81	-	83,17
Buton Tengah	-	9.29	-	95,50	-	91,55
Buton Selatan	-	35.48	-	96,22	-	52,63
Kendari	99,69	46.52	94,46	94,07	69,85	77,72
Baubau	99,80	33.24	96,68	95,72	79,01	83,16
Sulawesi Tenggara	99,28	24.13	93,91	94,08	72,67	75,99



LAMPIRAN



(4) Indikator Pendidikan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD		SMP		SMA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	99,06	96,73	81,02	83,01	70,99	78,47
Muna	96,32	97,02	79,37	89,72	83,83	77,19
Konawe	98,25	98,56	79,19	73,50	71,17	64,36
Kolaka	97,83	99,89	72,02	70,25	54,37	59,34
Konawe Selatan	98,37	100,00	83,14	75,63	58,45	67,40
Bombana	87,43	97,99	83,92	73,42	66,80	45,21
Wakatobi	97,12	98,21	82,58	84,64	51,81	61,04
Kolaka Utara	96,20	100,00	83,67	77,97	57,93	50,26
Buton Utara	90,00	94,21	82,50	79,58	70,00	55,04
Konawe Utara	96,23	97,84	88,10	75,10	47,84	48,42
Kolaka Timur	94,35	96,95	79,79	74,32	74,78	60,96
Konawe Kepulauan	96,72	98,00	96,18	83,76	56,10	66,18
Muna Barat	-	96,19	-	76,12	-	73,92
Buton Tengah	-	100,00	-	94,58	-	51,89
Buton Selatan	-	100,00	-	77,00	-	32,74
Kendari	98,87	97,46	70,53	59,71	55,41	52,65
Baubau	100,00	96,47	96,19	87,97	72,68	68,06
Sulawesi Tenggara	96,82	98,12	80,29	76,68	65,09	61,28



IV

(1) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Tahun	TPAK (%) Kota Baubau	TPT (%) Kota Baubau
(1)	(2)	(3)
2013	65,6	8,66
2014	64,14	6,79
2015	66,40	7,17
2017	62,85	7,07



LAMPIRAN

IV

(2) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Jenis Kelamin	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu (jiwa), 2017			Jumlah
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Bukan Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	39 201	2 708	12 473	54 382
Perempuan	26 342	2 279	29 211	53 403
Laki-laki+ Perempuan	65 543	4 987	41 684	112 214



IV

(3) Indikator Ketenagakerjaan

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Lapangan Pekerjaan Utama <i>Main Industry</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, Hunting, and Fisheries</i>	4 864	1 410	6 274
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	257	0	257
Industri / <i>Industry</i>	2 138	2 199	4 337
Bangunan/ <i>Construction</i>	5 487	297	5 784
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel/ <i>Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurants, and Hotels</i>	12 818	10 040	22 858
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan/ <i>Community, Social, and Personal Services</i>	12 481	11 815	24 296
Lainnya / <i>Others</i>	1 156	581	1 737
Jumlah/Total	39 201	26 342	65 543



LAMPIRAN

VI

(1) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²), 2017					Jumlah
	<20	20-49	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	2,05	33,19	42,55	18,16	4,06	100,00
Muna	1,21	30,80	48,76	13,23	5,99	100,00
Konawe	1,61	16,02	46,44	24,87	11,06	100,00
Kolaka	2,11	27,02	49,82	12,63	8,41	100,00
Konawe Selatan	0,52	23,83	53,57	15,57	6,51	100,00
Bombana	2,78	38,82	37,95	13,14	7,30	100,00
Wakatobi	1,16	20,72	53,23	18,61	6,28	100,00
Kolaka Utara	1,55	33,05	38,30	16,14	10,97	100,00
Buton Utara	1,45	41,68	41,79	10,22	4,86	100,00
Konawe Utara	0,32	21,63	49,62	18,21	10,21	100,00
Kolaka Timur	0,19	22,99	42,11	17,91	16,81	100,00
Konawe Kepulauan	0,47	22,81	56,00	16,32	4,39	100,00
Muna Barat	0,25	42,39	47,81	8,61	0,94	100,00
Buton Tengah	0,25	54,80	30,73	13,55	0,66	100,00
Buton Selatan	2,68	20,78	56,14	18,32	2,08	100,00
Kendari	17,11	22,95	29,23	14,28	16,44	100,00
Baubau	9,10	28,31	43,26	10,46	8,86	100,00
Sulawesi Tenggara	4,07	27,69	43,59	15,52	9,13	100,00



VI

(2) Indikator Perumahan dan Lingkungan

[Diolah dari Hasil Susenas]

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2017					
	Milik Sendiri	Kontrak/ sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	89,12	1,88	8,41	0,59	0,00	100,00
Muna	89,05	1,16	9,54	0,24	0,00	100,00
Konawe	90,50	3,53	5,97	0,00	0,00	100,00
Kolaka	81,81	3,86	8,68	5,36	0,29	100,00
Konawe Selatan	94,02	0,29	5,43	0,25	0,00	100,00
Bombana	92,27	2,59	4,66	0,48	0,00	100,00
Wakatobi	92,01	1,57	6,14	0,29	0,00	100,00
Kolaka Utara	85,11	3,93	10,18	0,66	0,12	100,00
Buton Utara	93,96	2,51	3,03	0,51	0,00	100,00
Konawe Utara	92,34	1,71	5,24	0,72	0,00	100,00
Kolaka Timur	91,83	2,66	4,17	1,34	0,00	100,00
Konawe Kepulauan	92,46	2,71	4,64	0,19	0,00	100,00
Muna Barat	94,22	0,00	4,78	1,01	0,00	100,00
Buton Tengah	73,74	8,06	18,19	0,00	0,00	100,00
Buton Selatan	90,92	0,00	9,08	0,00	0,00	100,00
Kendari	66,91	24,35	7,66	1,08	0,00	100,00
Baubau	65,01	12,51	21,62	0,85	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	84,78	6,22	8,06	0,91	0,03	100,00



LAMPIRAN

VII

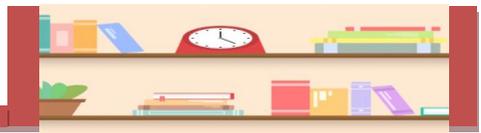
(1) Indikator Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buton	13.03	13.41	13,53	13.46	198 183	211 485
Muna	32.65	32.35	15,37	14.85	269 838	296 38
Konawe	38.14	37.99	16,09	15.65	241 617	267 33
Kolaka	28,56	26.64	15,05	13.78	292 370	327 329
Konawe Selatan	33,94	33.73	11,58	11.14	181 796	200 663
Bombana	22,04	21.52	13,06	12.36	246 908	270 627
Wakatobi	15,73	15.49	16,46	16.19	218 939	239 819
Kolaka Utara	24,32	23.42	17,11	16.24	256 680	406 334
Buton Utara	9,60	9.64	15,78	15.58	258 425	280 974
Konawe Utara	5,79	8.44	9,75	13.93	216 578	244 391
Kolaka Timur	28,52	28.86	15,71	15.64	291 862	323 956
Konawe Kepulauan	5,70	5.97	17,72	18.10	240 679	271 241
Muna Barat	12,32	12.89	-	16.24	-	297 787
Buton Tengah	12,33	16.73	-	18.35	-	220 897
Buton Selatan	10,75	12.66	-	15.99	-	213 869
Kendari	19,58	18.44	5,51	5.01	270 861	301 894
Baubau	13,87	13.55	8,81	8.39	274 066	297 991
Sulawesi Tenggara	326,86	331.71	12,88	12.81	257 553	285 609

<https://baubaukota.bps.go.id>

SUMBER DATA





SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran

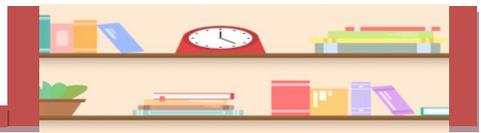
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/madya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November, tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar



bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

<https://baubaukota.bps.go.id>

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BAUBAU***

Jl. Murhum No. 52 Baubau 93726 Telp. (0402)2821277
Homepage: <http://baubaukota.bps.go.id>
Email: bps7472@bps.go.id